

Judul : Parlemen Kebut RUU RAPBN 2017 & Tax Amnesty
Tanggal : Jumat, 03 Juni 2016
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

Parlemen Kebut RUU RAPBN 2017 & Tax Amnesty

DEWAN Perwakilan Rakyat (DPR) dan pemerintah terus melakukan pembahasan RAPBN 2017. Jika pembahasan selesai, Presiden Joko Widodo akan menyampaikan RAPBN 2017 dalam Nota Keuangan pada pertengahan Agustus mendatang.

Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan mengatakan, DPR dan pemerintah sudah sepakat, selanjutnya akan dilakukan pembahasan lebih mendalam oleh setiap fraksi di Badan Anggaran DPR.

"Kita harus tancap gas membahas terkait dua hal, yakni RAPBN 2017, dan secara simultan bagaimana tindak lanjut dari RUU Tax Amnesty, akan dibahas revisi APBN 2016 dalam bentuk APBN-Perubahan 2016," kata Taufik, usai memimpin Paripurna, di Gedung DPR, kemarin.

Rapat Paripurna itu mendengarkan jawaban pemerintah yang diwakili Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro terhadap pandangan Fraksi DPR atas Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) RAPBN 2017.

Taufik bilang, jawaban pemerintah tersebut dinilai telah memperhatikan kondisi terkini bangsa. Sehingga, DPR menganggap pemerintah telah merespon, mengolah, mengakomodir dan mengkodikasi seluruh masukan dari setiap fraksi, dalam laporan pandangan sikap fraksi terhadap KEM-PPKF RAPBN 2017.

Setelah mendengar jawaban pemerintah, DPR melalui fraksi di Badan Anggaran melakukan pendalaman atas pandangan pemerintah. Sehingga, tindak lanjut dari kerangka RAPBN itu diserahkan sepenuhnya dalam dinamika pembahasan di Banggar.

Politisi Partai Amanat Nasional itu menegaskan, dalam penyampaian jawaban, pemerintah tidak dalam posisi menolak atau menerima pandangan fraksi-fraksi. Tetapi, mereka melakukan proses matrikulasi dan kodifikasi usulan mana saja yang bisa diharmonisasikan.

Taufik mengungkapkan, DPR menargetkan RAPBN 2017 rampung pada 15 Agustus 2016. Rencananya, RAPBN 2017 itu akan disampaikan Presiden saat



Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan didampingi Ketua DPR Ade Komarudin, Wakil Ketua DPR Fadli Zon dan Agus Hermanto menerima Jawaban Pemerintah terhadap Pandangan Fraksi DPR tentang KEM-PPKF 2017

penyampaian Nota Keuangan. "Pandangan RAPBN 2016 selanjutnya akan disampaikan Presiden Joko Widodo pada 15 Agustus. Kita tunggu saja tanggapan dari Presiden," imbunya.

Selain itu, Taufik menyatakan, *Tax Amnesty* bisa mendorong target pertumbuhan ekonomi pada 2017. Politisi PAN itu optimis pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,3 persen di tahun 2017 atau sesuai dengan asumsi yang dipatok pemerintah. Salah satu faktor pendorongnya adalah kebijakan pengampunan pajak atau *tax amnesty*.

"Kalau memang tidak ada kebijakan apapun memang tidak bisa memenuhi target pertumbuhan ekonomi."

Tapi ada langkah yang dilakukan pemerintah seperti *tax amnesty* dan itu mendorong pertumbuhan ekonomi," ujar wakil rakyat dari dapil Jawa Tengah itu.

Kebijakan pengampunan pajak akan mendorong dana masuk (*capital inflow*) yang besar ke dalam negeri. Artinya akan banyak dana beredar di dalam negeri. Bila dioptimalkan dengan

baik, makan akan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.

Kemudian adalah komponen investasi. Langkah pemerintah di antaranya, penyederhanaan perizinan usaha, penurunan harga gas industri dan tarif listrik serta pemberian insentif fiskal kepada kalangan dunia usaha.

Pemerintah juga diminta merealisasikan belanja untuk yang bersifat produktif. Di samping juga mempercepat realisasi belanja pemerintah daerah yang selama ini tertahan.

Sementara dalam pidato jawaban pemerintah, Bambang mengatakan, dalam kerangka ekonomi makro dan pokok kebijakan fiskal 2017, pemerintah memproyeksikan pertumbuhan ekonomi 5,3-5,9 persen. Laju inflasi 3-5 persen, dan kurs rupiah di level Rp 13.600-13.900 per dolar AS.

Imbal hasil surat berharga negara bertenor 3 bulan 5-6 persen. Dari sisi produksi migas, target lifting (produksi) minyak dipasang 740 ribu-760 ribu barel per hari dan lifting gas 1.050-1.150 ribu barel per hari setara minyak, sementara harga minyak

mentah Indonesia (ICP) US\$35-US\$45 per barel.

Sebelumnya, pemerintah telah mengajukan asumsi makro ekonomi untuk RAPBN 2017. Asumsi tersebut sudah sekaligus menyertakan dampak dari pemberlakuan *tax amnesty* pada tahun ini.

Bambang tidak menjelaskan lebih lanjut rincian pengaruh *tax amnesty* terhadap komponen asumsi makro. Akan tetapi ini sudah tergambar pada rentang asumsi yang ditetapkan.

Diketahui, tiga komponen yang terkena dampak *tax amnesty* adalah pertumbuhan ekonomi yang diasumsikan 5,3-5,9 persen, Inflasi 4±1 persen dan nilai tukar rupiah Rp 13.650-13.900 per dolar AS.

Sebelumnya, dalam perhitungan Bank Indonesia (BI), kebijakan *tax amnesty* akan membawa dana asing kembali ke tanah air. Ini yang memberikan pengaruh terhadap ketiga komponen tersebut. Dengan perkiraan repatriasi dana Rp 560 triliun, pertumbuhan ekonomi akan bertambah 0,3 persen, inflasi naik 0,3 persen dan nilai tukar rupiah akan menguat Rp 120/dolar AS. ■ TIM